

Pemberitaan Media Massa Cetak dan Agenda Khalayak Terhadap Pemilukada Aceh Tahun 2017

(Printed Mass Media Reporting and Public Agenda Toward Local Election in Aceh 2017)

Zulkarnain

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia

email: zulkarnainak@iainlangsa.ac.id

First received:
24 April 2020

Revised:
5 May 2020

Final Accepted:
18 May 2020

ABSTRACT

This study aims to see how the news on the printed media Serambi Indonesia and Rakyat Aceh regarding the local election of Aceh in 2017 toward the election of governor and deputy governor of Aceh province. The research method used was critical discourse analysis to the proclamation of election of governor and deputy governor of Aceh province in 2017. Thus the data collection technique through text analysis, structured interview with some informant and informant and documentation. In the election of the governor and deputy governor of Aceh province, there were several candidates utilized the existence of mass media to attract people's voice through vision, mission and work program (organizational communication). The utilization of mass media was done as part of strategy to build branded image to pairs of candidates. During the local election process, the media agenda was replaced with the public agenda due to the community had practised their maturity in politic, superior program offer from the candidates, track record from the candidates didn't have the past historical sin, no corruption, abuse of power and others. Public agendas have a bargaining position with media agendas so as the reporting of election published by media must be balanced and adhere to the principle of check and recheck. The result of the research showed that mass media have media agenda aimed to accompany readers to see and comment on the news published in mass media especially about Pemilukada.

Keywords: Local Election; Mass Media; Discourse; Public Agenda.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemberitaan pada media cetak Serambi Indonesia dan Harian Rakyat Aceh mengenai pemilukada Aceh tahun 2017 terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis wacana kritis terhadap pemberitaan pemilukada gubernur/wakil gubernur provinsi Aceh tahun 2017. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui analisis teks, wawancara terstruktur dengan beberapa narasumber dan informan serta dokumentasi. Pada pemilukada gubernur/wakil gubernur provinsi Aceh, ada beberapa pasangan calon yang memanfaatkan keberadaan media massa untuk menarik suara masyarakat melalui visi, misi dan program kerja (komunikasi organisasi). Pemanfaatan media massa dilakukan sebagai bagian dari strategi membangun *branded image* terhadap pasangang calon tersebut. Selama pelaksanaan pemilukada, agenda media digantikan dengan agenda khalayak dikarenakan beberapa hal: masyarakat telah menentukan pilihannya tanpa adanya pengaruh pemberitaan dari media massa, masyarakat telah mempraktekan kedewasaan dalam berpolitik, adanya tawaran program-program unggulan yang diusung oleh masing-masing pasangan calon. Selain sosok calon peserta pemilukada, masyarakat juga mencermati rekam jejak (*track record*) dari masing-masing pasangan calon dan Pasangan calon peserta pemilukada tidak memiliki dosa sejarah masa lalu seperti tidak terlibat dalam kasus korupsi, penyalahgunaan kewenangan dan lain-lain. Agenda khalayak memiliki bargaining position dengan agenda media sehingga pemberitaan pemilukada pada media massa harus berimbang (*check and recheck*). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Media massa memiliki agenda media yang

bertujuan menggiring pembaca untuk melihat dan mengomentari pemberitaan yang dipublikasikan pada media massa terutama tentang Pemilu 2014.

Kata kunci : Pemilu 2014; Media Massa; Wacana; Agenda Khayalak.

PENDAHULUAN

Secara naluriah, manusia membutuhkan berita karena mereka perlu mengetahui berbagai kejadian di luar pengalaman mereka. Pengetahuan tentang sesuatu membuat mereka bisa merencanakan dan mengatur hidup serta memberi rasa aman. Menurut Bill Kovach dan Thomas Rosentiel, jurnanisme hadir memberi pengetahuan yang berakar pada realitas, sehingga dapat membantu warga untuk mengenali komunitasnya, mengenali para pahlawan, dan para penjahat.

Peran jurnanisme sebagai sumber informasi dalam kehidupan sehari-hari mengemban ekspektasi yang tinggi. Berita diharapkan bersifat tidak berpihak dan independen sehingga khayalak dapat menilai dan menentukan sikapnya sendiri. Westerstahl menjelaskan prinsip ketidakberpihakan dan keseimbangan dalam berita—terutama berita yang mengandung konflik—amatlah penting agar tidak menggiring publik pada pandangan tertentu. Misalnya, media tidak boleh berpihak pada salah satu individu atau kelompok yang tengah bertikai. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipraktikkan dengan cermat dan hati-hati karena akan menentukan kualitas produk jurnanisme.

Peran jurnanisme juga ditentukan oleh medium yang digunakan. Nitzan Ben Shaul (2006) dalam bukunya *“A Violent World: TV News Images of Middle Eastern Terror and War”*, menekankan format audiovisual pada berita televisi sebagai ‘ladang ideologi yang sangat kuat’. Televisi menyajikan berita dengan format audiovisual yang dapat berperan dalam membentuk pola pikir yang lebih panjang bagi khayalak.

Berita pada dasarnya adalah cerita yang diciptakan dari realitas dengan narasi tertentu dalam konteks tertentu pula. Maksudnya media selalu membuat frame atau kerangka tertentu untuk memahami realitas sosial. Lewat wacana dan narasi yang ditampilkan, media dapat menawarkan definisi tertentu dari peristiwa, misalnya tindakan apa yang disebut memperjuangkan kepentingan masyarakat atau kepentingan individu dan kelompok.

Sehingga ketika menyimak berita dengan frame tertentu dalam surat kabar atau televisi, khayalak dapat tanpa sadar digiring oleh definisi yang ditampilkan media massa, yang dapat mengubah definisi khayalak tentang suatu peristiwa atau makin meneguhkan asumsi yang dimiliki. Khayalak dapat makin bersimpati atau malah makin membenci suatu kelompok.

Perkembangan Pers Indonesia dewasa ini menunjukkan adanya gejala yang paradoks antara cita idealnya dengan fakta di lapangan. Munculnya pelanggaran-pelanggaran etika jurnalistik di antaranya yang cukup marak adalah kasus wartawan bodrek (amplop), penyiaran pornografi dan sadisme, dan kasus libel (pencemaran nama baik). Tuduhan-tuduhan pers yang “njomplang”, tidak obyektif, “ahlul fitnah wal jamaah”, memplintir (spinning of words), dan sebagainya. Fenomena yang lain adalah munculnya budaya populer yang secara cepat mempengaruhi masyarakat sedemikian rupa sehingga muncul eksese negatif dari itu adalah sikap hedonis, permisif dan sebagainya.

Berbagai persoalan tersebut nampaknya tidak bisa dibicarakan secara parsial, oleh karena keberadaan media di masyarakat terkait dengan masyarakat dan sistem masyarakat itu sendiri. Agen—masyarakat—sistem adalah 3 hal yang pisahkan dalam pembahasannya. Demikian juga keberadaan media, menurut McQuail sebagaimana sebutkan oleh Sasa Djuarsa Sendjaja, tidak luput dari jaringan sosial yang lebih besar: sistem negara (orientasi politis), pengusaha media (orientasi kapital/bisnis), kelompok pembaca/pemirsa/pendengar, kelompok kelas dominan, pekerja media/pers, dan realitas sosial (*volce in society*).

Belum termasuk juga adanya tarik ulur kepentingan ideologi, ekonomi dan politik antara media massa, masyarakat dan negara. Sementara itu realitas budaya masyarakat (terutama

budaya yang krisis moral) juga semakin semakin mendorong terjadinya pelanggaran etika jurnalistik ini.

Pers memang harus diberi keleluasaan dan kebebasan dalam mencari dan menyiarkan informasi ke masyarakat. Namun demikian pers tidak lantas bebas sebebas-bebasnya, melainkan terikat dengan etika profesi yang melingkupinya, yakni etika jurnalistik. Etika ini disusun sebagai cita ideal sekaligus mengatur dan mengarahkan wartawan dalam menjalankan aktivitasnya. Etika jurnalistik ini menjadi standar moral dan etis bagi wartawan dan praktisi pers yang harus diperhatikan dan ditaati.

Harus diakui, selama ini media massa juga telah melakukan fungsi fungsinya tersebut, namun nampaknya banyak media massa yang belum melakukannya secara proporsional. Terutama bahwa pers sendiri juga sebagai agen perubahan sosial dan pilar keempat demokrasi berarti tidak sekedar menjadi media kosong yang dapat diisi oleh siapa saja (terlebih hanya pada yang memiliki kekuasaan kapital dan politis), melainkan memiliki otoritas dan otonomi untuk menentukan dan bertindak sesuai cita ideal dan fungsinya, terutama dalam memenuhi tanggungjawab sosialnya.

Dalam hal ini keterpihkan kepada kepentingan masyarakat yang lebih besar selaras dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan yang universal. Optimalisasi fungsi dan peran media massa dalam masyarakat demokratis menuntut dipatuhinya etika jurnalistik yang melingkupi tanggungjawabnya. Oleh karena itu berbagai kajian dan kritik terhadap pemberitaan di media massa menjadi penting untuk menunjukkan alternatif pembacaan media massa sehingga publik dapat mencermati pemberitaan-pemberitaan di media massa secara aktif dan cerdas.

Selama ini media (nampaknya) lebih banyak menyuplai dan membentuk budaya-budaya pop (*pop culture*), terutama televisi, yang membawa dampak hedonistik, konsumeristik, kekerasan, permisif bahkan a-sosial. Semestinya media juga memberi porsi yang berimbang guna proses pendidikan dan pendewasaan masyarakat. Kontrol sosial juga tidak hanya ditujukan kepada jalannya pemerintahan saja, tetapi juga mengontrol proses perkembangan masyarakat sehingga mengarah kehidupan yang lebih baik dalam bentuk masyarakat ideal.

Dari pengamatan yang peneliti lakukan sejak awal Januari 2016 saat isu pemilihan Kepala Daerah khususnya pemilihan gubernur mulai berhenbus, media terbitan Aceh, mulai ramai memberitakan berbagai individu yang akan tampil sebagai bakal calon Gubernur. Pemberitaan juga dilakukan tentang kisrus yang terjadi di tubuh Partai Aceh (PA) sebagai partai pemenang Pemilu :Legeslatif di Aceh yang memiliki suara di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR) yang mencapai 36 persen, kisrus terjadi akibat elit pimpinan partai ini berlomba untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Aceh.

Pertarungan wacana yang terjadi di media yang terbit di Aceh dalam kurung waktu beberapa bulan terakhir di dominasi pemberitaan tentang calon Gubernur dari Partai Aceh yang di wakili oleh sosok Muzakir Manaf (Wakil Gubernur saat ini), calon independent yang diwakili Datok Zaini Abdullah (Gubernur Aceh saat ini) dan Zakaria Saman (Mantan tuha peut PA) serta Irwandi Yusuf (mantan Gubernur yang dulunya juga di dukung oleh GAM), dan sosok nasionalis yang diwakili oleh Malik Raden (mantan Bupati Aceh Utara dan Staf Ahli kementerian Dalam Negeri) juga Abdullah Puteh (mantan Gubernur Aceh Priode 1998-2002).

Berbagai contoh wacana yang dikonstruksikan media dalam pemberitaan Pilkada Gubernur di atas menunjukkan bahwa dalam pemberitaan Pilkada ini wacana yang sering dikonstruksikan karena media menonjolkan fakta berupa alasan atau pemikiran hanya orang Aceh dan para mantan pejuang yang mampu membawa Aceh lebih makmur dan bermartaba Eriyanto (2002) menjelaskan, hasil akhir konstruksi realitas yang didasarkan pada cara pandang yang dilakukan media adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenali. Penonjolan atau penekanan aspek tertentu dari realitas akan membuat (hanya) bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih mudah diingat, dan lebih mengena dalam

pikiran khalayak.

Media seharusnya menyampaikan informasi secara jujur dan benar siapa sosok calon gubernur yang muncul ke publik dan tidak menyembunyikan latar belakang calon dengan bersembunyi di balik ikon pejuang. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk menelaah lebih dalam bagaimana perilaku awak media dan media yang terbit di Aceh dan Sumatera Utara dalam mewacanakan dan menampilkan ikon para calon Gubernur Aceh dalam pemberitaan politik masalah Pilkada Gubernur Aceh tahun 2017, dengan judul Analisis Pemberitaan Media Massa Cetak dan Agenda Khalayak Terhadap Pemilihan Aceh Tahun 2017.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi realitas politik pada media cetak terkait tentang pemberitaan pemilihan kepala Daerah Gubernur Aceh tahun 2017 ditinjau dari etika komunikasi Islam, secara lebih terperinci tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana pemberitaan pada media cetak menggambarkan agenda setting yang di jalankan media serambi Indonesia dan rakyat Aceh dalam berita pemilihan kepala daerah Aceh tahun 2017 dan untuk mengetahui bagaimana agenda khalayak dalam membicarakan pemilihan Gubernur Aceh tahun 2017.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis model Fairclough. Jenis penelitian kualitatif tidak mendasarkan bangunan-bangunan teori dan konsep sebagai hal utama pada tahap awal. Penelitian dalam kultur ini memulai dari data yang ada di lapangan. Kerangka teori dan pemikiran tidak untuk diuji dan dijadikan sebagai batasan, melainkan lebih sebagai referensi bagi peneliti untuk berjalan.

Penelitian ini adalah penelitian analisis wacana kritis yang bertujuan untuk mengetahui orientasi wacana yang ingin dicapai oleh Surat Kabar Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh melalui wacana dalam program berita politik yang diterbitkan. Analisis wacana kritis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebagai upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari subyek (pembuat berita) ketika mengemukakan suatu pernyataan. Pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi sang pembuat berita dengan mengikuti struktur makna dari sang pembuat berita sehingga bentuk distribusi dan produksi ideologi yang disamarkan dalam wacana dapat diketahui. Dalam studi analisis wacana, pengungkapan seperti itu dimaksudkan dalam kategori analisis wacana kritis.

Sumber data berasal dari berita Surat Kabar Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh. Pengambilan data teks berita Surat Kabar Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh dalam rentang waktu 1 Januari sampai 30 Februari 2017. Dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik snowball sampling peneliti melakukan wawancara mendalam dengan wartawan daerah, Surat Kabar Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh, wawancara juga dilakukan dengan warga kota Langsa untuk melihat bagaimana agenda mereka tentang pemilihan Gubernur Aceh tahun 2017.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, pada analisis data dilakukan kegiatan antara lain proses sintesis, pencarian pola-pola, dan penemuan makna. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan caramenganalisis teks berita tentang berita harian Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh.

Secara operasional dan sesuai dengan tujuan penelitian, analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis wacana kritis seperti yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Fairclough. Alasan pemilihan model Fairclough dalam penelitian ini karena menurut anggapan peneliti, pendekatan Fairclough menyajikan perangkat analisis yang komprehensif di dalam melakukan analisis terhadap sebuah teks. Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi: text, discourse practice, dan sociocultural practice. Kerangka analisis yang dikembangkan oleh Fairclough terdiri dari analisis teks, analisis praktik-praktik wacana dalam

bentuk produksi dan konsumsi teks, dan analisis praktik-praktik sosio-kultural.

Metode yang dikembangkan termasuk deskripsi linguistik teks dari segi kebaksaannya, interpretasi hubungan antara proses yang melebar luas dalam produksi dan konsumsi teks dan teksnya, dan eksplanasi hubungan antara proses diskursif di atas dan proses sosial. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis teks sesuai dengan pendapat Fairclough (1989) bahwa ada tiga tahapan analisis yang harus dilakukan dalam analisis wacana kritis; Deskripsi (analisis teks), Interpretasi (analisis praktik wacana), dan Eksplanasi (analisis praktik sosiokultural).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2017-2022, masyarakat lebih melihat kepada sosok yang diusung oleh partai pendukung, bukan berdasarkan dari partai mana dia berasal. Alasan seperti ini dianggap logis dikarenakan masyarakat lebih mengenal secara dekat sosok yang ikut bertarung untuk memenangkan kursi Aceh-1. Selain itu masyarakat juga mengenal sosok yang bertarung melalui pemberitaan media massa yang mempublikasikan secara besar-besaran tokoh itu.

Umumnya pemberitaan yang dimunculkan pada media massa berisi tentang janji-janji politik peserta pemilu gubernur yang bertujuan menarik suara dan menakutkan masyarakat agar memilih sosok itu sewaktu pemungutan suara. Sewaktu pelaksanaan pemilu gubernur terutama untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sosok yang mendapat porsi pemberitaan besar dari media massa terutama harian serambi indonesia dan waspada adalah wakil gubernur saat itu yakni muzakir manaf atau yang akrab di panggil dengan mualem yang diusung oleh partai lokal yang berkuasa saat itu.

Ada beberapa faktor penyebab kenapa masyarakat sangat mengenal sosok itu, pertama beliau adalah satu-satunya sosok pemimpin yang diusung dan mendapatkan mandat penuh dari partai Aceh sebagai partai resmi penerus perjuangan UUPA, kedua beliau adalah ketua dewan wilayah (DPW) partai Aceh, ketiga saat itu beliau menjabat sebagai pejabat publik yakni wakil gubernur Aceh periode 2012-2017, keempat masyarakat dibuai dengan janji-janji politik dari pasangan ini seperti peningkatan taraf hidup masyarakat baik diperkotaan maupun perdesaan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan mutu kesehatan, memperjuangkan hak-hak politik masyarakat Aceh yang diamanahkan dalam UUPA, Optimalisasi pembangunan di wilayah pantai barat selatan Aceh, penurunan angka pengangguran melalui pembukaan lapangan kerja, iklim investasi yang ramah terhadap investor dan lain-lain.

Disamping itu juga, keberadaan sosok yang diusung telah menjadikannya sebagai *media darling*, artinya sosok itu mendapatkan porsi pemberitaan yang begitu bombastis karena sosok ketokohnya sekaligus mewakili entitas kedaerahan yang menarik minat pemilih tradisional. Media darling disini lebih memperlihatkan kepada kerja-kerja agenda media dibandingkan dengan agenda publik, namun seiring dengan berjalannya waktu, sosok itu telah berhasil membangun branded image tersendiri sehingga menyebabkan masyarakat telah memiliki agendanya dan diputuskan ketika masa pemilihan dilaksanakan.

Keberadaan sosok ini juga didukung beberapa hasil polling yang dilakukan oleh lembaga survey yang menempatkan beliau sebagai kandidat terkuat untuk memenangkan pemilu gubernur/wakil gubernur. Prediksi ini didasarkan atas banyaknya dukungan partai politik nasional terhadap sosok ini. Dukungan ini dilakukan sebagai bagian dari melanjutkan perdamaian di aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki sekaligus melegitimasi keberadaan partai Aceh sebagai the winning party dalam pemilu gubernur. Beberapa pemimpin partai nasional turut serta memberikan dukungan kepada pasangan muzakir manaf/T.A Khaliq terutama dari partai Gerindra dengan pimpinannya Prabowo Subianto. Dukungan ini dilakukan karena adanya beberapa alasan seperti: ketua DPD partai Gerindra adalah kandidat wakil gubernur provinsi Aceh, adanya kesamaan ideologi secara kepartaian, adanya kesamaan visi dan misi yang diusung oleh partai tersebut dan romantisme dukungan antar partai sewaktu pelaksanaan pemilihan

presiden/wakil presiden 2014-2019.

Berkenaan dengan peran media massa terhadap peliputan pemilu pada 2017 terutama untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, kontribusi media massa terlihat sewaktu pelaksanaan kampanye terbuka yang dilakukan oleh pasangan calon peserta pemilu terutama pasangan yang banyak mendapatkan atensi dari masyarakat seperti pasangan mualek/T.A Khaliq, Irvandi Yusuf/Nova Iriansyah, Zaini Abdullah/Nasruddin dan Apa Karya/T. Alaidinsyah. Pasangan-pasangan tersebut mampu menyedot perhatian publik dan media massa melalui program-program unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat.

Umumnya program-program yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon telah mendapatkan porsi pemberitaan dari media massa terutama janji-janji politik yang usung oleh masing-masing pasangan calon. Media massa turut menyediakan halaman khusus berkenaan dengan pemberitaan pemilu. Keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon dipublikasikan pada halaman editorial khusus.

Kampanye terbuka yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon serta menarik minat pemilih mendapatkan pemberitaan besar oleh media massa itu. Hal ini menjadi bagian dari agenda media untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi tentang pelaksanaan pemilu.

Berkenaan dengan peliputan media massa terhadap pelaksanaan pemilu, selaku salah satu jurnalis di wilayah kota Langsa, saya melihat media massa lebih banyak memberitakan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon baik pemilihan gubernur/wakil gubernur maupun walikota/wakil walikota. Sedangkan tahapan-tahapan dalam pemilu yang telah disusun KPU seperti sosialisasi, pendaftaran calon peserta, penetapan calon peserta, penarikan nomor urut peserta pemilu, penyampaian visi misi masing-masing calon, kampanye dialogis, kampanye terbuka, masa pemilihan dan penetapan pemenang juga mendapatkan porsi pemberitaan dari media massa.

Pihak penyelenggara sangat gencar mempublikasikan kegiatan pemilu kepada masyarakat terutama pemilih pemula dengan maksud menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak politiknya setiap 5 tahun sekali sekaligus mengurangi rendahnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. Untuk peliputan pemilu gubernur/wakil gubernur provinsi Aceh periode 2017-2022 khusus untuk kota Langsa tentunya dibanjiri oleh para pemilih yang simpatik kepada kandidat mereka dan kota ini masih dapat terkendali mengingat masyarakatnya yang majemuk dan cerdas. Bahkan boleh dibilang aman karena kita melihat pergerakan dari tim ses kandidat sendiri tidak brutal. Dengan kata lain himbauan yang dilayangkan oleh pihak keamanan dan KPU Langsa mampu ditindak lanjuti dengan seksama oleh mereka. Tentunya semua orang berharap agar keamanan dapat dijaga dan dipelihara demi kelancaran semua urusan khususnya ajang pemilihan kepala daerah.

Menurut hemat saya keadaan kota Langsa pada waktu itu sedikit tenang karena peran dari pihak keamanan yang ekstra dalam menjaga keamanan terbilang tertib. Walaupun ada sebilangan kecil terjadi insiden-insiden yang bersumber di beberapa titik yang disebabkan oleh ulah tim ses atau pendukung-pendukung yang fanatik dan memicu beda pendapat tentang calon yang didukung dengan cara merusak baliho atau poster salah satu calon namun hal ini telah sampai ke tangan panwaslu.

Kejadian-kejadian ini biasanya terjadi di daerah atau lokasi yang sulit dipantau oleh panwaslu karena lokasi yang di pinggiran kota. Namun pada akhirnya setiap kandidat mendapatkan peringatan dari pihak panwaslu untuk sedapat mungkin mengingatkan tim ses dan pendukung fanatik agar tidak berbuat curang pada baliho dan poster kandidat lain. Menurut keterangan yang kami peroleh dari pihak keamanan dan panwaslu kejadian itu hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada unsur untuk mengacaukan suasana pemilu di Kota Langsa agar tidak tenang dan tertib. Dengan sigap setelah beberapa kandidat melaporkan hal ini ke panwaslu hal ini segera ditangani dengan di backup oleh pihak keamanan.

Pelaksanaan pemilu untuk kota Langsa dari pantauan kita di mana situasi sangat kondusif. Ini memberikan sinyal bahwa keterbukaan masyarakat sudah berada pada tingkat

cerdas. Masyarakat melihat bahwa suatu keadaan yang tentram dan aman akan memberikan suatu indikasi bagaimana seharusnya mereka berperilaku sehari-harinya. Dengan demikian rutinitas sehari-hari mereka tidak terganggu dan dapat berjalan dengan lancar.

Menurut masyarakat memilih pemimpin adalah menentukan nasib mereka ke depan. Hendaknya pembangunan yang telah digagas saat ini dapatlah berlangsung terus di masa akan datang. Miris rasanya jika pemimpin yang dipilih cuma untuk sebuah simbol semata tanpa mampu berbuat banyak bagi kehidupan masyarakatnya. Tahun berganti tahun namun pembangunan hanya tinggal rencana saja. Ini adalah contoh pemimpin yang tak mampu mengubah konsep menjadi realita. Hari masyarakat semakin pintar dan kritis di mana mereka tak lugu lagi dalam memilih pemimpin daerahnya. Program demi program dikritik oleh masyarakat dengan tujuan agar konsep pembangunan untuk lima tahun dapat diperjelas. Jadi bisa kita bilang janji tidak tinggal janji. Dengan demikian setiap kepala daerah yang maju harus benar-benar siap untuk memaparkan program kerjanya dalam jangka lima tahun ke depan.

Sewaktu pelaksanaan pilukada bulan April 2017 yang lalu, selaku perwakilan masyarakat kota Langsa, saya melihat adanya agenda khalayak dimana masyarakat sehingga mereka memiliki pilihannya tersendiri tanpa dipengaruhi oleh pemberitaan pada media massa. Gejala ini merupakan bentuk pendewasaan cara berpolitik masyarakat terhadap peserta pilukada walaupun masyarakat turut melihat dan membaca pemberitaan pilukada pada media massa. Selain itu, makin kritisnya masyarakat untuk melihat peserta pilukada melalui visi misi yang diusung oleh peserta ketika penyampaian visi misi didepan para pelaksana pilukada 2017 mengisyaratkan bahwa agenda publik telah terbentuk dengan sendirinya di masyarakat.

Pembentukan agenda khalayak di masyarakat umumnya dipengaruhi oleh faktor dalam (*internal factor*) dan faktor luar (*external factor*). Faktor dalam misalnya perubahan cara berpikir masyarakat (*community main set*) terhadap calon peserta pilukada, cara masyarakat menentukan pilihannya, kemampuan membangun *personality* untuk menarik minat pemilih, kemampuan calon peserta pilukada untuk menterjemahkan visi misi yang realistis untuk di aplikasikan, kreatifitas dalam menjabarkan visi misi dan lain-lain. Sedangkan faktor *external* umumnya dipengaruhi oleh lingkungan di mana pilukada itu berlangsung, isu primordial, isu kedaerahan pemanfaatan media sosial untuk menarik pemilih pemula melalui postingan kegiatan yang dilakukan di masyarakat, faktor tingkat pendidikan pemilih, faktor *topographi*/kewilayahan pemilih dan lain-lain.

Terkait dengan penetapan agenda publik, masyarakat beragumen bahwa apakah visi misi yang diusung realitis untuk dilaksanakan paska terpilih dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat atau visi misi itu hanya sebatas penyampaian secara simbolik tanpa mengandung nilai-nilai sosial, pendidikan, moral dan estetika.

Mencermati pelaksanaan pilukada gubernur/wakil gubernur Aceh periode 2017-2022, terlihat bahwa agenda khalayak telah mampu mengalahkan agenda media yang selama ini peran agenda media selalu mendominasi dan mempengaruhi masyarakat terhadap pilihannya. Ini dapat kita lihat sewaktu pelaksanaan pilukada 5 tahun yang lalu, dimana saat itu agenda media sangat mendominasi dan memberikan pengaruh kepada pemilih untuk menentukan pilihannya sehingga masyarakat tidak memiliki agendanya sendiri. Permasalahan ini terjadi dikarenakan pemimpin pada saat ini menggunakan pengaruh dan kekuasaannya (*abuse of power*) untuk menggiring media agar mempublikasikan pemberitaan secara besar-besaran terutama menyangkut sosok yang diusung oleh partai politik saat itu.

Berkenaan dengan peliputan media massa terhadap pelaksanaan pilukada umumnya pemberitaan lebih banyak mempublikasikan kegiatan pilukada sesuai tahapan pilkada seperti sosialisasi, pendaftaran bakal calon, penetapan calon peserta, pelaksanaan pilkada, pemunggutan suara dan pengumuman pemenang pilkada.

Ini mengindikasikan bahwa agenda tahunan yang disusun oleh pihak penyelenggara pilukada selalunya mendapatkan porsi pemberitaan dari media massa. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari desiminasi informasi dan keterbukaan informasi kepada publik sesuai

dengan yang diamanahkan dalam undang-undang penyiaran dan keterbukaan informasi.

Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya di Kabupaten Aceh Tamiang, hiruk pikuk pemilukada berlangsung tertib walau ada kisruh-kisruh kecil itu biasa. Namanya saja orang buat pesta pastilah suasana gemuruh di sana sini akan ada. Apalagi ini pesta rakyat maka suasana hiruk pikuk ini dapat terjadi di mana saja. Kalau sepi bukan pesta rakyat namanya ya kan pak. Pihak keamanan, seperti polisi merupakan orang yang paling berkuasa waktu itu demi kelancaran dan keamanan kabupaten Aceh Tamiang mereka menurunkan seluruh personilnya dan dibantu juga oleh sebagian kecil personil Bataliyon TNI Tualang Cut untuk mengamankan suasana pemilukada di kabupaten ini. Kita juga insan press berharap agar semua pihak yang memiliki gawean saat itu dapat mengontrol diri demi kelancaran pesta rakyat dan berlangsung aman. Jika keadaan aman pasti aktivitas kita sehari-hari dapat berjalan lancar tanpa terjadi sesuatu apapun.

Terlebih lagi pemerintah kabupaten Aceh Tamiang benar-benar serius memperhatikan suasana pemilihan kepala daerah dengan seksama. Karena jika mereka lalai sedikit saja maka keributan kecil bisa mempengaruhi keadaan fisiologis para pemilih untuk menyalurkan suara mereka pada kotak TPS yang mereka tuju. Jadi oleh karena itu para pengawas pemilih harus benar-benar ekstra dalam bekerja agar tidak terjadi kesalah pahaman antar pendukung dan pihak pemilih

Keadaan kota Langsa sewaktu pelaksanaan pemilukada kemarin di mana masyarakatnya sangat beradab dan memaklumi tahun politik berlangsung. Waktu itu masyarakat sedang berpesta untuk menentukan masa depan lima tahun yang akan datang. Untuk memilih seorang pemimpin daerah tentu perlu berkorban setidaknya sehari untuk melakukan pemilihan di TPS. Keterlibatan berbagai pihak untuk menjaga keamanan sangat menentukan jalannya pemilihan kepala daerah baik untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur maupun calon walikota/wakil walikota Langsa.

Padahal kalau kita sadar pesta rakyat ini perayaannya hanya memakan waktu lebih kurang sebulan tapi karena setiap orang sangat bernaafsu untuk memenangkan jagoannya maka akan berdampak kepada pihak-pihak lain yang tidak terlibat secara langsung yang berakhir pada huru hara yang tidak ada ujung penyelesaiannya. Syukur hal tersebut tidak sampai terjadi karena setiap orang mampu menjaga diri masing-masing dan tidak mudah terpancing provokasi murahan.

Menyangkut aspek keamanan selama pemilukada gubernur/wakil gubernur merupakan harga mati. Ini menandakan ciri masyarakat kita telah cerdas. Tidak ada gunanya kita bertengkar dengan sesama suku dan agama hanya untuk sebuah suara. Rasanay sangat rugi kalau kita menciptakan keributan yang tidak berakar ujung.

Pada pemilukada 2017 rakyat punya hak untuk memilih siapa saja menurut mereka itu patut dan pantas untuk dipilih menjadi pemimpin di daerah nya. Bisa jadi hari ini kita memilih orang lain tapi siapa tahu pada pemilukada ke depan kita pula yang dipilih orang lain. Jadi kehidupan ini ibarat seperti roda, kadang dibawah kadang pula bisa di atas untuk memimpin daerah yang kita cintai ini. Ini lah pesta rakyat, jadi janganlah mencoba mencari keributan hanya untuk kepentingan yang sesaat dan tidak berarti. Indonesia ini adalah negara kesatuan (NKRI) maka setiap masyarakat haruslah mentaatinya demi kemaslahatan umat. Dengan begitu setiap warga negara wajib menjaga keamanan hingga titik darah yang penghabisan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan pihak TNI/Polri telah memetakan wilayah-wilayah di Indonesia yang rawan dengan tindak kekerasan terutama dalam hal pelaksanaan pemilukada. Adapun daerah yang dianggap rawan antara lain: Aceh, DKI Jakarta dan Papua. Daerah-daerah tersebut memiliki karakteristik wilayah dan pemilih yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain, misalnya provinsi Aceh dan Papua adalah daerah bekas konflik dan sisa-sisa konflik masih terlihat hingga saat ini. Sedangkan provinsi DKI Jakarta di kategorikan rawan dikarenakan isu agama dan kompleksitas permasalahan yang dialami oleh masyarakat di sana.

Mediapun juga ikut memantau jalannya pilkada tersebut termasuk kami singgahi beberapa TPS

disetiap pos pemilihan. Masyarakat Langsa pun juga tertib dalam melakukan pemilihan pada setiap TPS. Jadi ucapan terima kasih bolehlah kita berikan kepada setiap pihak yang terlibat dalam menjaga ketentraman umum pada waktu pemilihan umum yang lalu. Ini adalah buah dari kesadaran masyarakat dalam berpolitik dengan tetap memperhatikan tingkat keamanan di Kota Langsa ini. Bayangkan jika semua pihak terjebak dengan egosentris yang menjurus pada timbulnya emosi jiwa maka kerugian yang muncul akan menjadi derita kita semua.

Media massa juga memainkan peran kontrol terutama pemberitaan pemilu/kada misalnya adanya peliputan tentang tahapan pelaksanaan pemilu/kada mulai dari penyaringan bakal calon, pendaftaran calon, penetapan calon, jadwal kampanye, masa tenang, penghitungan suara dan penetapan pemenang oleh KIP. Keseluruhan peran ini dilakukan sebagai bagian dari penciptaan *one stop information center* yang memberikan kemudahan kepada pemilih untuk mendapatkan informasi secara utuh berkenaan dengan pelaksanaan pemilu/kada.

Beberapa calon gubernur dan wakil gubernur juga mendapatkan porsi pemberitaan dari media massa. Umumnya pemberitaan menyangkut tentang penyampaian visi misi dari masing-masing calon, kampanye dialogis yang dilakukan oleh masing-masing calon dan kampanye terbuka oleh masing-masing calon. Selain sosok Muzakkir Manaf dan Irwandi Yusuf, sosok calon gubernur lain yang menyedot perhatian publik dan media massa adalah Zakaria Saman atau yang lebih dikenal dengan sebutan Apa Karya. Sosok ini dianggap unik, punya sense of humor dan pembawaannya yang agak berbeda dari pasangan yang lain. Selain itu cara menjelaskan visi misi dan program sangat berbeda dengan calon yang lain sehingga media massa mengelarnya sebagai *Raising Star* yang memberikan warna dan semangat baru dalam pemilu/kada kemarin.

Menyangkut pemberitaan pemilu/kada oleh media massa, umumnya masyarakat saat itu juga mendapatkan pemberitaan dari media sosial seperti facebook, What Apps, Instagram, Line dan lain-lain. Pemberitaan melalui media sosial ini jauh lebih cepat dan akurat dibandingkan media cetak. Biasanya media cetak melakukan peliputan di lapangan dan mewawancarai beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai etika jurnalistik.

Pemberitaan pemilu/kada oleh media massa juga menaikkan tingkat partisipasi publik untuk menggunakan hak pilihnya terutama pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak politiknya. Pemberitaan pemilu/kada juga membantu pihak penyelenggara terutama komisi independen pemilihan (KIP) dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu/kada. Hal ini berdampak langsung terhadap semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dikarenakan begitu gencarnya pemberitaan pemilu/kada yang dipublikasikan oleh media massa.

Adapun ciri-ciri pemberitaan yang mengedepankan agenda khalayak antara lain: a) Masyarakat telah menentukan pilihannya tanpa adanya intervensi dari pemberitaan media, b) Penentuan pilihan oleh masyarakat umumnya didominasi oleh sosok calon peserta pemilu/kada, c) Selain sosok calon peserta pemilu/kada, masyarakat juga mencermati rekam jejak (*track record*) dari masing-masing pasangan calon, d) Pasangan calon peserta pemilu/kada tidak memiliki dosa sejarah masa lalu seperti tidak terlibat dalam kasus korupsi, penyalahgunaan kewenangan dan lain-lain.

Media massa terutama media cetak juga berperan memberikan pendidikan politik praktis kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pengajaran bagaimana cara berpolitik yang baik dan santun. Disamping itu juga, media massa berkontribusi terhadap membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam perhelatan pesta demokrasi setiap 5 tahun sekali, menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan dari penelitian ini, *Pertama*, media massa memiliki agenda media yang bertujuan mengiring pembaca untuk melihat dan

mengomentari pemberitaan yang dipublikasikan pada media massa terutama tentang Pemilu. *Kedua*, pada pemilu gubernur/wakil gubernur provinsi Aceh, ada beberapa pasangan calon yang memanfaatkan keberadaan media massa untuk menarik suara masyarakat melalui visi, misi dan program kerja.

Ketiga, pemanfaatan media massa dilakukan sebagai bagian dari strategi membangun *branded image* terhadap pasangan calon tersebut. *Keempat*, ada beberapa pasangan calon gubernur/wakil gubernur provinsi Aceh periode 2017-2022 yang dijadikan media darling oleh media massa dikarenakan beberapa hal seperti: figur pasangan calon, ketokohan pasangan calon dan partai pendukung dari pasangan calon itu. *Kelima*, peran media massa sewaktu pelaksanaan pemilu, lebih terfokus pada kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon antara lain: masa penyaringan bakal calon, pendaftaran pasangan calon, penarikan nomor urut pasangan calon, debat terbuka dari masing-masing pasangan calon, kampanye terbuka dari pasangan calon, pemunggutan suara dan penentuan pemenang pemilu.

Keenam, sewaktu pelaksanaan pemilu, agenda media digantikan dengan agenda khalayak dikarenakan beberapa hal: masyarakat telah menentukan pilihannya tanpa adanya pengaruh pemberitaan dari media massa, masyarakat telah mempraktekan kedewasaan dalam berpolitik, adanya tawaran program-program unggulan yang diusung oleh masing-masing pasangan calon. Selain sosok calon peserta pemilu, masyarakat juga mencermati rekam jejak (*track record*) dari masing-masing pasangan calon dan Pasangan calon peserta pemilu tidak memiliki dosa sejarah masa lalu seperti tidak terlibat dalam kasus korupsi, penyalahgunaan kewenangan dan lain-lain. *Ketujuh*, agenda khalayak memiliki bargaining position dengan agenda media sehingga pemberitaan pemilu pada media massa harus berimbang (*check and recheck*).

DAFTAR PUSTAKA

- Baksin, A. (2006). *Jurnalistik Televisi: Teori dan Praktik*. Bandung: Simbiosis Rekayasa Media.
- Baran, S & Dennis KD. (2010). *Teori Dasar Komunikasi Massa*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Boyd, A. (2001). *Broadcast Journalism: Techniques of Radio and Television News* 5th edition. Focal Press.
- Chion, M. (1994). *Audio-Vision: Sound on Screen*. New York: Columbia University Press.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daymon, C. & Immy, H. (2008). *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relation dan Marketing Communication*. Jogjakarta: Bentang.
- Eide, E. & Risto, K. (2008). *Transnational Media Events: The Mohammed Cartoons and The Imagined Clash of Civilizations*. Swedia: Nordicom.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: Penerbit Obor.
- Fairclough, N. (1989). *Language and Power: Language In Social Life*. London: Longman.
- Gerungan, W. A. (1991). *Psikologi Sosial*. Bandung: PT. Eresco.
- Hamad, I. (2004). *Rekonstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Granit.

- Kovach, B. & Thomas, R. (2004) *Elemen-Elemen Jurnalisme: Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan yang Diharapkan Publik*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Kriyantono, R. (2009). *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Law, S. & Glover, D. (2000) *Educational Leadership and Learning*. London: Open University Press.
- Marsetio, D. (1982). *Manajemen dalam Pengertian dan Pendidikan Berpikir*. Surabaya: Usaha Nasional.
- McQuail, D. (2000). *Mass Communication Theory*, 4th Ed. Sage Publication.
- McQuail, D. (2005). *Mass Communication Theory*, 5th Ed. Sage Publication.
- Morissan, M. A. (2010). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Penerbit Ghalia Universitas Indonesia.
- Neuman, L. (2006). *Social Research Methods* Sixth Edition. Boston: Pearson Education.
- Oteng, S. (1983). *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional*, Cet.1 (Bandung: Angkasa.
- Paletz, D. L. & Alex, P.S. (1991). *Terrorism and the Media*. Newbury Park, California: Sage.
- Poerwandari, E. K. (2007). *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Kampus UI Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3).
- Santana, S. (2004). *Jurnalisme Investigasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Selby, K. & Ron, C. (1995), *How to study television*. London: MacMillan Press.
- Shelley, E. T. (2009). *Psikologi Sosial*, Edisi Kedua Belas. Jakarta: Kencana Media Group.
- Shoemaker, P. J. & Stephen D. R. (1996). *Mediating the message theories of influence on mass media content*. New York: Longman Publisher.
- Sobur, A. (2002). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Penerbit Rosdakarya.
- Stephen, W. L. & Karen, A. F. (2005). *Theories of Human Communication*, 8th Ed. Thomson Wadsworth.
- Sudibyo, A. (2001). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: Penerbit Obor.
- Syafaruddin, S. (2005). *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Cet.1. Jakarta: Ciputat Press.
- Tischer, S. (2009). *Metode Analisis Teks dan Wacana (Abdul Sukur, Penerjemah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- West, R & Lynn H. T. (2007). *Introducing communication theory analysis and application* 3rd edition. New York: McGraw-Hill.